COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI *EVENT BEAUTIFUL* MALINO DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nur Rahmi
NPP. 33.0944
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: nurrahmi1030@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si
Email: hapritarigan@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The development of tourism and the creative economy in Gowa Regency through the Beautiful Malino event faces challenges in the effectiveness of collaboration between stakeholders, which is less than optimal. The involvement of actors such as local governments, MSMEs, the private sector, academics, the media, and the community is not fully balanced, resulting in challenges in coordination, communication, and program sustainability.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the application of collaborative governance in creative economy development through the Beautiful Malino event and identify supporting and inhibiting factors for collaboration.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes reduction, presentation, and drawing conclusions. The research also employed Ansell and Gash's (2007) collaborative governance theory as an analytical framework.* ***Result:*** *The research results show that collaborative governance implemented through the four Ansell and Gash dimensions was found to be sufficiently good overall: starting conditions were adequate with strong institutional resources and a history of cooperation since 2017; facilitative leadership was active but still top-down; institutional design showed commitment to inclusive participation, though MSME involvement in strategic decisions needs improvement; and collaborative process demonstrated strong trust and shared commitment among stakeholders.* ***Conclusion:*** *The implementation of collaborative governance in creative economy development through the Beautiful Malino event in Gowa Regency has generally run well across all four Ansell and Gash dimensions, with local government serving as the main facilitator in building communication, coordination, and trust-based cooperation, contributing to a tourist visit increase of more than 30%. However, government dominance and capacity imbalances among stakeholders must be addressed to strengthen sustainable collaborative governance.*

.

Keywords: *beautiful malino; collaborative governance; creative economy; gowa regency; tourism event*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Gowa melalui *event Beautiful* Malino menghadapi permasalahan dalam efektivitas kolaborasi antar stakeholder yang belum optimal. Keterlibatan aktor seperti pemerintah daerah, UMKM, swasta, akademisi, media, dan masyarakat belum sepenuhnya seimbang, sehingga menimbulkan kendala koordinasi, komunikasi, dan keberlanjutan program. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *event Beautiful* Malino. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) sebagai kerangka analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang diimplementasikan melalui empat dimensi Ansell dan Gash secara umum berjalan cukup baik: kondisi awal memadai dengan sumber daya kelembagaan yang kuat dan sejarah kerja sama sejak 2017; kepemimpinan fasilitatif aktif namun masih cenderung *top-down;* desain kelembagaan menunjukkan komitmen pada partisipasi inklusif meskipun keterlibatan UMKM dalam keputusan strategis perlu ditingkatkan; serta proses kolaborasi mencerminkan kepercayaan dan komitmen bersama yang kuat antaraktor. **Kesimpulan:** Implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa secara umum telah berjalan dengan cukup baik pada keempat dimensi Ansell dan Gash, dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator utama yang membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama berbasis kepercayaan sehingga kunjungan wisatawan meningkat hingga lebih dari 30%. Namun, dominasi pemerintah dan ketidakseimbangan kapasitas antaraktor perlu diatasi untuk memperkuat tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Beautiful* Malino; *Collaborative Governance*; Ekonomi Kreatif; *Event* Pariwisata; Kabupaten Gowa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi menuntut perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan. Pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik, melainkan dituntut mampu membangun hubungan yang partisipatif, inklusif, dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan (Emerson et al., 2012). Pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan publik yang semakin kompleks membutuhkan keterlibatan aktor lintas sektor, baik pemerintah, swasta, akademisi, media, komunitas, maupun masyarakat sipil dalam satu proses pengambilan keputusan bersama (Thomson & Perry, 2006).

Salah satu sektor yang membutuhkan tata kelola kolaboratif adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan sektor ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan penguatan identitas daerah (Purnomo, 2016). Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif (Rosyadi et al., 2020).

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Letak geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta kekayaan budaya lokal menjadi modal dasar yang dapat

dioptimalkan melalui penyelenggaraan *event* pariwisata. Sebagai bentuk inovasi kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2017 menyelenggarakan *Event Beautiful* Malino yang merupakan program unggulan daerah yang mengintegrasikan nilai seni, budaya, dan kreasi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif (Santoso et al., 2023).

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan signifikan, dari 19.427 pengunjung pada tahun 2017 hingga mencapai lebih dari 120.000 pengunjung pada tahun 2025. *Event Beautiful* Malino juga memberikan dampak positif terhadap nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya tata kelola kolaboratif antar *stakeholder*. Masih ditemukan berbagai persoalan seperti belum seimbangnya keterlibatan aktor, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya pemberdayaan pelaku UMKM (Muallim et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino merupakan persoalan kebijakan publik yang membutuhkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penelitian mengenai *collaborative governance* dan pengembangan ekonomi kreatif selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan secara umum, strategi pengembangan pariwisata, maupun kajian tentang pemberdayaan UMKM secara parsial (Kustanti, 2022). Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek kebijakan satu sektor, koordinasi organisasi, dan efektivitas institusi secara makro.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif melalui *event* pariwisata tahunan di tingkat kabupaten masih sangat terbatas. Padahal, *event* pariwisata seperti *Beautiful* Malino merupakan arena kolaborasi multiaktor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor (Sentanu et al., 2023). Selain itu, kajian yang secara spesifik mengambil lokus di Kabupaten Gowa dan menggunakan perspektif teori Ansell dan Gash (2007) dengan indikator *starting conditions, facilitative leadership, institutional design,* dan *collaborative process* juga belum banyak ditemukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya kajian empiris yang menganalisis secara komprehensif penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena *Event Beautiful* Malino merupakan program unggulan daerah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata Kabupaten Gowa. Keberhasilan penyelenggaraan *event* ini sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, UMKM, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Rosalia et al. (2023) menunjukkan bahwa model kolaborasi multistakeholder seperti pentahelix sangat menentukan keberhasilan pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka kelemahan-kelemahan dalam tata kelola kolaboratif akan terus berlanjut tanpa perbaikan sistematis, mengakibatkan potensi ekonomi kreatif daerah tidak berkembang secara optimal, keterlibatan UMKM dan masyarakat semakin marjinal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi terhambat (Azizah et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan *collaborative governance* serta menjadi bahan

evaluasi dalam meningkatkan tata kelola pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Gowa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Sentanu et al. (2023) melakukan *systematic literature review* terhadap 29 artikel tentang keberhasilan dan tantangan *collaborative tourism governance* yang dipublikasikan di *European Journal of Tourism Research* (Scopus). Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang inklusif, dan kepercayaan antaraktor merupakan faktor kunci keberhasilan tata kelola kolaboratif pariwisata di berbagai konteks. Temuan ini selaras dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, Alamsyah et al. (2020) meneliti *collaborative governance* dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan dimensi Ansell dan Gash. Penelitian ini menemukan bahwa *face-to-face dialogue*, membangun kepercayaan, dan komitmen antaraktor merupakan tahapan krusial dalam keberhasilan kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Ketiga, Yasintha (2020) mengkaji *Collaborative Governance* dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal terbukti efektif dalam meningkatkan daya tarik wisata daerah, meskipun keseimbangan kekuatan antar aktor masih perlu dioptimalkan.

Keempat, Berliandaldo et al. (2021) menganalisis kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder* dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinong. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kejelasan peran *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya merupakan faktor penentu keberhasilan kolaborasi multisektoral dalam pengembangan pariwisata.

Kelima, Rosyadi et al. (2020) meneliti peran multi-*stakeholder* dalam model pendampingan terpadu UMKM di sektor ekonomi kreatif. Penelitian yang dipublikasikan di *SAGE Open* (Scopus) ini menemukan bahwa sinergi antar aktor yang terstruktur dan berbasis kepercayaan secara signifikan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM sektor ekonomi kreatif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2007). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek efektivitas *event* atau pengembangan UMKM secara parsial (Affiangit & Dewi, 2024; Muallim et al., 2024), penelitian ini menitikberatkan pada analisis komprehensif empat dimensi *collaborative governance*, yaitu *starting conditions, facilitative leadership, institutional design,* dan *collaborative process*, berikut faktor pendukung dan penghambatnya (Thomson & Perry, 2006; Emerson et al., 2012). Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang aplikatif sebagai bahan rekomendasi penguatan tata kelola kolaboratif di Kabupaten Gowa.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui Event Beautiful Malino di Kabupaten Gowa berdasarkan dimensi Ansell dan Gash, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi tersebut.



II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta empiris (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Kecamatan Tinggimoncong (Malino) sebagai lokasi penyelenggaraan *event* secara langsung, dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai pusat koordinasi kebijakan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua lokasi tersebut merupakan arena utama implementasi *collaborative governance* dalam *Event Beautiful* Malino, sekaligus tempat di mana seluruh pemangku kepentingan dapat diakses untuk keperluan pengumpulan data dimana peneliti pelaksanakan penelitian untuk pengumpulan data pada bulan Agustus 2025 - Juni 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino serta kemampuan memberikan informasi yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2022). Informan kunci dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, dipilih sebagai pemimpin fasilitatif dan pengambil keputusan utama yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap dinamika kolaborasi lintas sektor; (2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, dipilih karena mengelola strategi promosi dan koordinasi antarinstansi sehingga dapat menggambarkan proses kolaborasi pada level operasional; (3) Pihak swasta/sponsor, dipilih sebagai representasi sektor bisnis yang berkontribusi dalam pendanaan *event* sekaligus mencerminkan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam tata kelola kolaboratif; (4) Pelaku UMKM peserta *event*, dipilih karena merupakan kelompok sasaran utama pengembangan ekonomi kreatif yang paling merasakan dampak langsung dari kualitas kolaborasi yang terbangun; (5) Akademisi, dipilih atas dasar keahlian dalam kajian pariwisata dan tata kelola kolaboratif sehingga dapat memberikan perspektif kritis dan objektif; dan (6) Anggota masyarakat/komunitas lokal, dipilih sebagai penerima manfaat langsung sekaligus representasi kepentingan publik dalam proses kolaborasi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2022) yang terdiri atas tiga tahapan: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi utama: *starting conditions* (kondisi awal), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), *institutional design* (desain kelembagaan), dan *collaborative process* (proses kolaborasi). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa

Penilaian *collaborative governance* mengacu pada teori Ansell dan Gash (2007) yang meliputi empat dimensi utama yaitu *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino.

3.1.1 *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Kondisi awal *collaborative governance* diukur dari sumber daya dan pengetahuan *stakeholder*, insentif dan kendala, serta sejarah kerja sama (Ansell & Gash, 2007). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi awal kolaborasi dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino tergolong cukup baik, ditunjukkan oleh adanya sumber daya kelembagaan dan otoritas yang dimiliki pemerintah daerah, keterlibatan aktif berbagai aktor, serta sejarah kerja sama yang telah terbangun secara berkelanjutan sejak tahun 2017. Meskipun demikian, ketidakseimbangan kapasitas antara pemerintah dan pelaku UMKM masih menjadi tantangan dalam membangun kondisi awal yang optimal, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Rosyadi et al. (2020).

3.1.2 *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif diukur dari indikator mediasi, fasilitasi dialog, dan pemberdayaan *stakeholder* (Ansell & Gash, 2007). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dimensi kepemimpinan fasilitatif tergolong cukup baik, terlihat dari peran aktif pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi mediasi terhadap perbedaan kepentingan antaraktor, menyediakan forum komunikasi dan rapat koordinasi secara rutin, serta berupaya memberdayakan *stakeholder* melalui pelatihan dan pendampingan (Emerson et al., 2012). Namun, pola kepemimpinan yang masih cenderung *top-down* dan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan perlu dioptimalkan agar seluruh aktor dapat berpartisipasi secara lebih setara (Thomson & Perry, 2006).

3.1.3 *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan diukur dari indikator partisipasi inklusif, aturan dasar yang jelas, dan transparansi proses (Ansell & Gash, 2007). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dimensi desain kelembagaan dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino tergolong cukup baik, terlihat dari komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, adanya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*, serta upaya pemerintah dalam membangun keterbukaan informasi melalui komunikasi formal dan informal. Hal ini selaras dengan temuan Berliandaldo et al. (2021) bahwa kejelasan peran *stakeholder* merupakan faktor penentu keberhasilan kolaborasi multisektoral. Meskipun demikian, partisipasi kelompok *stakeholder* seperti UMKM dan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis masih perlu ditingkatkan, sejalan dengan catatan Affiangit dan Dewi (2024) tentang pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam implementasi kebijakan pariwisata.

3.1.4 *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi diukur dari indikator membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2007). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses kolaborasi dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino tergolong cukup baik, terlihat dari terbangunnya hubungan kepercayaan antaraktor melalui komunikasi yang konsisten dan transparan, tingginya komitmen *stakeholder* yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan, serta terbentuknya kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan pariwisata daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini selaras dengan Yasintha (2020) yang menemukan bahwa kepercayaan antaraktor merupakan prasyarat utama keberhasilan kolaborasi.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa secara umum telah berjalan cukup baik pada keempat dimensi yang dikaji. Hasil ini sejalan dengan kerangka integratif kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson et al. (2012), yang menegaskan bahwa *collaborative governance* yang efektif memerlukan keterpaduan antara kondisi sistem, dinamika kolaborasi, dan aksi bersama yang berkelanjutan. Selain itu, Sentanu et al. (2023) dalam *systematic literature review*-nya menyimpulkan bahwa kolaborasi multiaktor yang terstruktur mampu mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara lebih efektif.

Penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik karena berfokus langsung pada konteks *event* pariwisata tahunan di tingkat kabupaten, dengan mengukur kualitas kolaborasi berdasarkan empat dimensi Ansell dan Gash (2007) secara komprehensif. Hal ini berbeda dari kajian Azizah et al. (2023) yang lebih menekankan strategi pengembangan wisata, maupun Rosalia et al. (2023) yang fokus pada model pentahelix dalam pengelolaan BUMDes. Kekhasan temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan *event* secara kuantitatif, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola kolaboratif yang dibangun secara inklusif dan berkelanjutan (Kustanti, 2022).

Penelitian menemukan beberapa faktor utama yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino. Faktor pendukung meliputi: (1) koordinasi efektif antar pemangku kepentingan yang difasilitasi melalui forum komunikasi seperti rapat persiapan dan koordinasi teknis (Thomson & Perry, 2006); (2) komunikasi yang terbuka secara formal maupun informal sehingga mendukung pemahaman bersama dan penyelesaian masalah secara cepat; dan (3) kepercayaan antaraktor yang telah terbangun melalui kerja sama berkesinambungan sejak penyelenggaraan pertama tahun 2017 (Alamsyah et al., 2020).

Adapun faktor penghambat meliputi: (1) ketidakseimbangan kapasitas antaraktor, di mana kapasitas antara pemerintah dan pelaku UMKM yang tidak seimbang menyebabkan partisipasi yang tidak merata dalam pengambilan keputusan (Rosyadi et al., 2020); (2) dominasi pemerintah dengan pola hubungan *top-down* yang menghambat partisipasi setara bagi seluruh aktor (Emerson et al., 2012); (3) kendala infrastruktur dan keterbatasan SDM khususnya pada pelaku UMKM (Muallim et al., 2024); serta (4) evaluasi yang belum optimal karena mekanisme evaluasi pasca-*event* belum dilakukan secara sistematis (Lubis et al., 2025), sehingga kendala yang muncul tidak segera teridentifikasi dan diselesaikan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa secara umum telah berjalan dengan cukup baik, ditinjau dari empat dimensi Ansell dan Gash (2007), yaitu *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator utama yang membangun komunikasi, koordinasi, serta hubungan kerja sama berbasis kepercayaan (Thomson & Perry, 2006) sehingga kunjungan wisatawan meningkat hingga lebih dari 30%.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino di Kabupaten Gowa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks *event* pariwisata atau daerah lain. Selain itu, penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif membuat hasil penelitian bergantung pada kondisi lapangan saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2022).

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan kajian pada jenis *event* pariwisata dan wilayah yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif, sejalan dengan rekomendasi Sentanu et al. (2023). Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dapat dilakukan untuk menghasilkan analisis yang lebih terukur terkait efektivitas *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh informan dan pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Affiangit, T., & Dewi, M. F. (2024). Implementation of Regional Regulation Number 15 of 2019 about the tourism village in Somongari Village. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *14*(2), 181–195. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4655

Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2020). Collaborative governance dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 112–127. https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Azizah, N., Deliarnoor, N. A., & Sagita, N. I. (2023). Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *13*(2), 142–151. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3558

Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder* dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinong. *INOBIS:*

Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 4(2), 221–234. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Kustanti, R. (2022). Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Jepara. *Ekobistek*, 11(3), 246–251. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.366

Lubis, S., Hardianti, & Ahmad, R. M. (2025). E-government quality and organizational readiness as drivers of public service efficiency. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *15*(2), 212–223. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v15i2.5969

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Muallim, A. H., Juharni, J., & Suaib, M. R. (2024). Collaborative governance pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah: Studi kasus Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengembangan pariwisata Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 83–88. https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5159

Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.

Rosalia, F., Makhya, S., & Budiono, P. (2023). Pentahelix model in the development of village-owned enterprises (BUMDes) in Sidomulyo District South Lampung Regency Lampung Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *13*(2), 200–210. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3660

Rosyadi, S., Kusuma, A. S., Fitrah, E., Haryanto, A., & Adawiyah, W. (2020). The multi-stakeholder's role in an integrated mentoring model for SMEs in the creative economy sector. *SAGE Open*, *10*(4). https://doi.org/10.1177/2158244020963604

Santoso, E. B., et al. (2023). Pengembangan obyek wisata Nagari Tuo Pariangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 178–199. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3763

Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 33, 1–29. https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, *66*(s1), 20–32. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–15. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219